
PENERAPAN SISTEM E-KATALOG SEBAGAI POLA KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM (Studi Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu)

Octa Dwi Sofian¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang

Email: dwisofianocta@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-katalog yang di implementasikan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Batu. Selain itu untuk menganalisa lebih mendalam tentang sebuah proses kemitraan khususnya bagi UMKM yang ada di Kota Batu terkait dengan adanya e-katalog. Dengan diterapkan e-katalog maka memberikan ruang gerak dalam kemitraan antar instansi pemerintahan dan UMKM yang ada di Kota Batu. Masalah difokuskan pada proses kemitraan yang meliputi: pemanfaatan teknologi digital, transparansi UMKM, ketergantungan terhadap pemerintah dan persyaratan administratif. Dalam penelitian ini mengacu pada penerapan sistem e-katalog terkait dengan proses kemitraan dengan UMKM. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif dengan menganalisa strategi pengembangan sumber daya manusia. Data-data dikumpulkan melalui melalui hasil wawancara dari staff yang ada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu serta ketua UMKM Batu Orange Cake. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam kemitraan sudah terlaksana dan perlu adanya perbaikan pada poin-poin tertentu pada saat proses kemitraan.

Kata kunci: E-Katalog, Kemitraan, Produktivitas dan UMKM.

Abstrack

This research aims to determine the application of the e-catalog system implemented by the Batu City Goods and Services Procurement Section, especially in the process of procuring goods and services within the Batu City Government. Apart from that, to analyze more deeply about a partnership process, especially for UMKM in Batu City, related to the existence of an e-catalog. By implementing the e-catalog, it provides space for movement in partnerships between government agencies and UMKM in Batu City. The problem focuses on the partnership process which includes: use of digital technology, transparency of UMKM, dependence on government and administrative requirements. This research refers to the implementation of an e-catalog system related to the partnership process with UMKM. The research method used is descriptive qualitative by analyzing human resource development strategies. Data was collected through interviews with staff in the Batu City Goods and Services Procurement Section as well as the head of Batu Orange Cake UMKM. This study concludes that the partnership has been implemented and needs to be improved at certain points during the partnership process.

Keywords: E-Catalog, Partnership, Productivity and UMKM.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Di era digital ini, teknologi informasi sudah menjadi bagian dari keseharian manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas akademis, bisnis, dan sebagainya. Ekonomi kreatif merupakan wujud dari upaya mencari pembangunan-

pembangunan berkelanjutan yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbaru melalui kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Sebagai faktor produksi yang utama salah satu bidang ekonomi kreatif yang cukup berkembang dan bertahan adalah sektor UMKM yang ada di Negara Indonesia.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terpenting dari sektor ekonomi kreatif harus mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah dalam mengembangkan eksistensi dan produktivitasnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara realita terbukti lebih tangguh dibandingkan dengan usaha dengan modal besar. Pada saat usaha besar mengalami kemerosotan, UMKM justru dapat menyerap tenaga kerja karena menggunakan sumberdaya yang bersifat lokal sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan yang bersifat global. Untuk mewujudkan sistem pembangunan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang partisipatif maka dikembangkan model kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Melalui interaksi ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan di bidang pengembangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja di daerah. Pengembangan UMKM sangat diharapkan fasilitasi pemerintah untuk memberikan solusi atas berbagai kesulitan dan permasalahan yang dihadapi UMKM. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dalam pengembangan ekonomi di tanah air.

Thee (1993) dalam Kuncoro (2007:364) mengemukakan bahwa

industri kecil adalah cara yang dinilai besar peranannya dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan.

Suwarni dalam Priani (2023) Berdasarkan survei Asian Development Bank (ADB) terkait terhadap UMKM di Indonesia, 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Meski begitu, ada tiga kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu: Pertama, pelaku UMKM masih terkendala pada kapaistas produksi barang. Bahkan tidak sedikit UMKM yang justru gagal di pasar digital. Kedua, kualitas daya tahan pelaku UMKM yang masih belum merata, karena di pasar digital ini para pelaku UMKM harus dapat bersaing dengan perusahaan besar yang juga beralih menggunakan platform digital. Ketiga, diperlukan penguatan edukasi literasi digital dan penguatan sumber daya manusia para pelaku usaha UMKM

Dunia digital saat ini diprediksi akan menjadi salah satu poin yang krusial bagi seluruh aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas dalam dunia bisnis. Beberapa indikator yang bisa digunakan saat ini antara lain

naiknya pengeluaran iklan digital, naiknya perkembangan kepemilikan smartphone yang bisa menyediakan kemudahan akses internet, perbaikan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka peningkatan kualitas akses data (Utomo dalam Priani, 2023).

Pesatnya perkembangan teknologi digital berimbas pada dunia pemasaran dimana tren pemasaran beralih dari yang semula konvensional berubah menjadi digital. Strategi digital marketing ini lebih prospektif karena memungkinkan para calon pelanggan untuk memperoleh segala macam informasi mengenai produk dan dapat bertransaksi melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan model kewirausahaan yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Hal inilah yang kemudian dapat melahirkan model kewirausahaan digital. Model bisnis ini berasal dari kombinasi teknologi digital dan kewirausahaan yang kemudian menghasilkan fenomena karakteristik baru dalam dunia bisnis.

Pada saat ini model kemitraan UMKM berbasis digital merupakan solusi yang tepat yang harus diimplementasikan oleh *stake holder* terkait. Mengruncut pada permasalahan UMKM yang ada di Kota Batu banyak kesulitan memasarkan hasil produksi secara *online* dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna. Solusi untuk menunjang kegiatan UMKM yang ada di Kota Batu untuk meningkatkan pemasaran produk saat

ini adalah dengan mengaplikasikan teknologi digital seperti e-commerce ataupun media sosial bahkan mungkin startup yang dijadikan sebagai digital marketing. Digital marketing sendiri merupakan sebuah memanfaatkan berbagai sarana misalnya jejaring sosial.

Sehingga kedepannya para pelaku UMKM yang ada di Kota Batu bisa ikut terbantu dalam pemasaran produknya dan dapat berkembang lebih pesat karena adanya peran teknologi digital. Dengan begitu, pengembangan UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital ini akan kegiatan promosi dan pencarian pasar melalui media digital secara online dengan mendorong UMKM agar bertahan lama pula di pasar digital. Selain itu diperlukan kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, dimulai dari proses pengolahan produk hingga pemasaran produk.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk terus dapat mempertahankan dan meningkatkan UMKM, maka diperlukan peran penting dari pemerintah Kota Batu yaitu dengan cara kemitraan berbasis sistem E-Katalog yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu dengan pelaku UMKM khususnya Batu Orange Cake.

Sesuai dengan pengamatan dan identifikasi permasalahan yang ada akan membuat judul penelitian yaitu: **“Penerapan Sistem E-Katalog Sebagai Pola Kemitraan Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM (Studi Pada**

Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu)“.

Kerangka Teori Implementasi E- Katalog

Katalog elektronik adalah suatu sistem berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga barang, yang dituangkan dalam suatu daftar dan mudah diakses secara digital. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) adalah organisasi yang mengelola dan mengembangkan e-katalog secara elektronik guna memenuhi kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (Dama et al., 2020).

Menurut Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis katalog elektronik antara lain: a. Katalog Elektronik Nasional, merupakan katalog yang disusun dan dikelola oleh Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyusun dan mengelola katalog elektronik nasional. Katalog elektronik ini berlaku untuk semua kepentingan negara Indonesia pada umumnya b. Katalog Elektronik Sektoral disusun dan dikelola oleh kementerian dan lembaga. Cakupan E Katalog sektoral biasanya lebih kecil dari E Katalog nasional. c. Katalog Elektronik Lokal yang di kelola oleh Pemerintah Daerah dan telah menyusun katalog informasi elektronik. Kriteria barang dalam E katalog lokal bersifat repetitif dan standar.

PedomanKementerian/Lembaga/ Pemda dan Pemasok untuk Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dengan Memanfaatkan Toko Online dan Katalog Elektronik Pemerintah Untuk Pengadaan Barang/Jasa, agar Pengadaan Barang/Jasa Transparan dan Tercatat Secara Elektronik dengan cepat dan mudah. Penggunaan katalog elektronik untuk pembelian barang disebut E-Purchase dengan metode negosiasi harga, mini-competition atau katalog kompetitif. Barang/Jasa yang masih termasuk dalam katalog elektronik tetap berlaku sampai berakhirnya kontrak katalog dan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Umum tentang Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

- a. Kontrak Lumsum, Kontrak dengan lingkup pekerjaan yang tetap dan harga yang tetap dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang memberikan jasa dan pembayaran berdasarkan tahapan produk/output yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
- b. Kontrak Harga Satuan, Kontrak harga satuan adalah untuk semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, tetapi jumlah pekerjaan masih diperkirakan pada saat penandatanganan kontrak. Setelah penandatanganan, pembayaran harus dilakukan sesuai

- dengan hasil pengukuran bersama yang direalisasikan dengan kuantitas proyek, dan nilai kontrak akhir akan ditentukan setelah selesainya semua proyek.
- c. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, adalah kontrak untuk pembelian barang / kerja pembinaan / jasa di mana kerja itu disimpulkan di bawah kontrak.
 - d. Kontrak Payung, Perjanjian dimana pembeli dan penjual menyepakati harga tertentu untuk jenis barang atau jasa tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - e. Kontrak Putar Kunci, adalah perjanjian pembangunan fasilitas di mana pemasok setuju untuk membangun proyek secara keseluruhan sampai selesai, termasuk pemasangan semua peralatan, sehingga proyek siap untuk dioperasikan.
 - f. Kontrak Biaya Plus Imbalan, Suatu jenis kontrak yang digunakan dalam konteks penanganan keadaan darurat, yang mencakup perhitungan biaya aktual ditambah kompensasi dengan persentase tetap dari biaya aktual atau jumlah kompensasi yang tetap.
 - g. Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan, Ini adalah kontrak untuk layanan yang ruang lingkupnya tidak dapat didefinisikan secara rinci atau tidak dapat dipastikan.
 - h. Kontrak Tahun Jamak, kontrak antara pemerintah dan perusahaan, yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah, bahwa perusahaan akan

menyediakan barang atau jasa lebih dari satu tahun setelah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Kontrak akan ditetapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- a. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi ialah kontrak lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, putar kunci dan biaya plus imbalan
- b. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi non konstruksi ialah kontrak lumsum, kontrak berdasarkan waktu penugasan dan kontrak payung.
- c. Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi ialah kontrak lumsum dan kontrak berdasarkan waktu penugasan.

Kemitraan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah menjelaskan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Julisar Annaf (2007) kemitraan usaha dilakukan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi, pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a.

membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a) mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. b) mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. c) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. d) mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. e) mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. f) mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. g) dan mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha

yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sebagai berikut:

Dalam pasal 1 ayat 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal 1 ayat 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal 1 ayat 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam pengembangan UMKM terdapat tiga kelompok UMKM ditinjau dari kapasitas dan kualitas yang dimiliki yaitu (Primiana, 2009:46):

1. UMKM yang kapasitas dan kualitas produknya baru dapat memenuhi kebutuhan lokal.
2. UMKM yang kapasitas dan kualitas produknya sudah dapat memenuhi kebutuhan Nasional.
3. UMKM yang kapasitas dan kualitas produknya sudah dapat menembus pasar internasional.

Dari definisi UMKM diatas dapat dijelaskan bahwa karakteristik dari UMKM memiliki karakteristik yang hampir sama, menurut Kuncoro (2007:365) karakteristik UMKM sebagai berikut:

Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan bidang operasional. Kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarganya dan kerabatnya.

Kedua, rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat dan pedagang perantara.

Ketiga, sebagian besar dari UMKM ditandai belum memiliki status badan hukum.

Keempat, dilihat dari golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, lalu diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu dan sejenisnya.

Faktor Pendukung Pengembangan UMKM

Menurut Hadiyati (2010:21) menyebutkan faktor yang mendukung dalam pengembangan UMKM antara lain:

1. Adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan tuntutan dari masyarakat untuk membangun sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dapat membuka peluang usaha baru.
3. Berlangsungnya proses transformasi dan globalisasi ekonomi akan semakin memperluas bidang-bidang usaha.
4. Bahan baku yang digunakan banyak berasal dari masing-masing daerah atau memanfaatkan sumber daya alam lokal.
5. Pekerja banyak bersal dari lingkungan sekitar UMKM dalam berproduksi, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

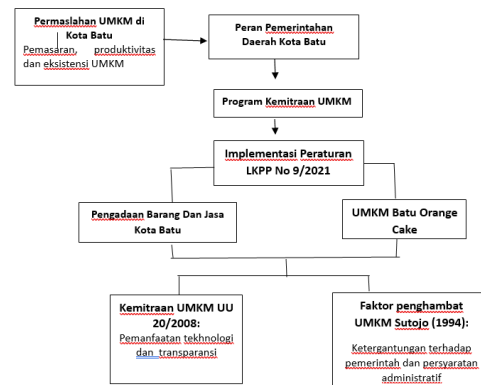
Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan UMKM

Menurut Sutojo (1994) dalam Baswir (1997:49) menyebutkan faktor yang menghambat dalam pengembangan sektor UMKM antara lain:

1. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha.
2. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.
3. Sistem akuntansinya kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki sama sekali.
4. Skala ekonominya terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya.
5. Kemampuan pemasaran cenderung terbatas.
6. Marjin keuntungannya sangat tipis.
7. Lebih dari separuh didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
8. Selain masalah permodalan masalah yang timbul bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan usaha.
9. Sebagian besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif guna memperoleh bantuan bank.
10. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
11. Hampir 70% melakukan pemasaran langsung kepada konsumen.

12. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar.

Kerangka Berfikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir Penelitian
Sumber: Data skunder yang diolah

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu bentuk penjabaran terhadap masalah yang telah diungkapkan secara kongkret. Berdasarkan uraian latar belakang, asapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu?
2. Faktor penghambat penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan

secara terperinci rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan sumber daya aparatur, serta dijadikan sebagai acuan bagi kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Batu khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta

pelaku UMKM dalam melakukan program kemitraan.

IMETODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan sebuah proses kegiatan sosial, terutama dengan permasalahan dalam pelayanan publik secara khusus. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dan ditentukan dengan lebih fokus secara komprehensif, mendalam dan alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Silalahi (2009:77) didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini meliputi: 1) Penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM dengan sasaran dan kajian sebagai berikut: Pemanfaatan teknologi digital dan Transparansi UMKM Kerjasama. 2) Faktor penghambat penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM mencakup: Ketergantungan dengan

pemerintah dan persyaratan Administratif

Lokasi Penelitian

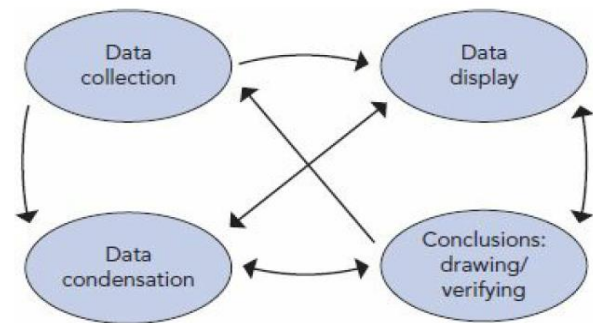
Lokasi penelitian ini berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu yang terletak di Balai Kota Among Tani - Gedung A Lantai 3 Jl. Panglima Sudirman No 507 Kota Batu dan UMKM Batu Orange Cake yang beralamatkan di Dusun Binangun Desa Bumiaji dengan alasan sebagai berikut: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu yang mengimplimentasikan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sedangkan UMKM Batu Orange Cake merupakan mitra dan terdaftar di toko online Pemerintahan Kota Batu.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif antara lain adalah manusia, peristiwa, lokasi penelitian dan dokumen (foto, berkas, arsip, jurnal dan laporan). Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, wawancara serta alat pendukung (perekam dan kamera).

2.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014). Aktivitas dalam analisis data meliputi empat tahapan yang meliputi: *Data Collection*, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.



Gambar 2.1 Analisis Data Model Interaktif.
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu

Penerapan e-katalog merupakan hal yang kritis dalam pengadaan karena terbukti banyak memberikan pengaruh positif. E-katalog dibutuhkan oleh pengguna barang secara langsung. Berdasar pada pedoman yang jelas e-katalog akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk penggunaannya. Hal ini memungkinkan pembelian cepat dan terkonsolidasi. Berikut gamabar e-katalog Kota Batu:



Gambar 3.1 Halaman Awal E-Katalog
Sumber: E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)

Pemanfaatan Teknologi Digital

Internet tidak dapat dihindari, telah mengubah pola komunikasi di

dunia. Pemanfaatan internet dengan baik dapat menjadikan hubungan antara perusahaan dengan konsumen menjadi lebih dekat karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Namun penggunaan yang kurang tepat dapat juga berakibat negatif, sebagai contoh pengiriman E-mail secara terus menerus dapat menyebabkan konsumen merasa terganggu (Colgate & Smith, 2005).

Pemasaran digital sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital khususnya internet sangat mempengaruhi UMKM. Pemasaran digital merupakan sebuah pendekatan baru dalam pemasaran dan bukan hanya pemasaran konvensional yang ditambahkan unsur teknologi digital (Taiminen & Karjaluoto, 2015).

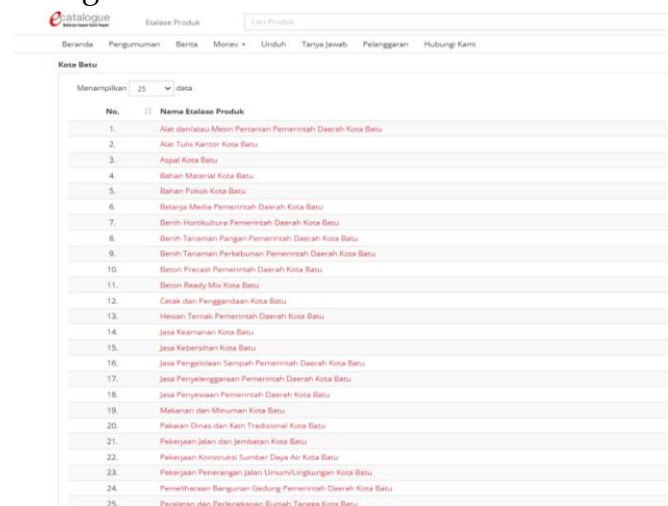
Dalam penerapan Teknologi Digital pada perusahaan perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi setiap perusahaan karena tidak terdapat satu standar penerapan teknologi digital yang dapat diterapkan ke seluruh perusahaan (Ramdani, Chevers, & A. Williams, 2013).

Dengan adanya teknologi digitalisasi memberikan sebuah pendorong untuk mengatasi permasalahan UMKM yang ada di Kota Batu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan aplikasi belanja online bernama E-katalog. Aplikasi ini menyediakan informasi tentang produk khusus pemerintah. Pembelian secara elektronik atau yang dikenal dengan e-

purchase adalah suatu metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko online. Dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu sebagai eksekutor tingkat daerah.

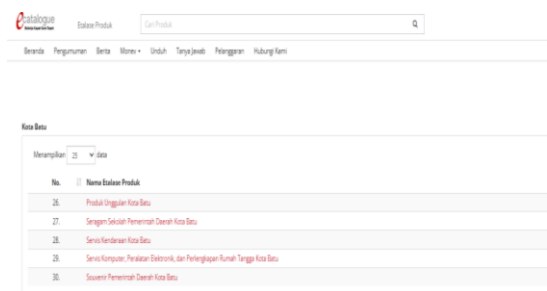
Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Taufan Pabeta, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu menyatakan "*Kami selaku perpanjangan dari LKPP bertugas untuk melakukan pengadaan barang dan jasa khususnya di Kota Batu secara elektronik, Harapan saya para pelaku UMKM yang ada di Kota Batu bisa bersaing secara sehat*". (Wawancara tanggal 4 Juni 2024, pukul 10.00 WIB di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu).

Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah kategori UMKM yang terdaftar di e-katalog Kota Batu sebanyak 30 kategori jenis usaha. Berikut gambar dari kategori UMKM .



The screenshot shows the 'E-katalog' website interface. At the top, there is a search bar and navigation links: Beranda, Pengumuman, Berita, Menu, Unduh, Tanya Jawab, Pelanggaran, and Hubungi Kami. Below the navigation, the page title is 'Kota Batu'. A dropdown menu shows 'Menampilkan 25 data'. The main content is a table with 25 rows, each representing a product category. The table has two columns: 'No.' and 'Nama Estase Produk'.

No.	Nama Estase Produk
1.	Alat dan/atau Mesin Pemrosesan Pemerintah Daerah Kota Batu
2.	Alat Tulis Kantor Kota Batu
3.	Appl Kota Batu
4.	Bahan Material Kota Batu
5.	Bahan Poltek Kota Batu
6.	Betanga Media Pemerintah Daerah Kota Batu
7.	Berih Hortikultura Pemerintah Daerah Kota Batu
8.	Berih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Kota Batu
9.	Berih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Kota Batu
10.	Beton Precast Pemerintah Daerah Kota Batu
11.	Beton Ready Mix Kota Batu
12.	Cetak dan Pengandaan Kota Batu
13.	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Kota Batu
14.	Jasa Keamanan Kota Batu
15.	Jasa Kebersihan Kota Batu
16.	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kota Batu
17.	Jasa Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batu
18.	Jasa Penyewaan Pemerintah Daerah Kota Batu
19.	Makanan dan Minuman Kota Batu
20.	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Kota Batu
21.	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kota Batu
22.	Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air Kota Batu
23.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Linum/Lingkaran Kota Batu
24.	Permeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Kota Batu
25.	Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Kota Batu



Gambar 3.2 Kategori UMKM di E-Katalog
 Sumber: E-Katalog 5.0 (lkpp.go.id)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Siti Roidah selaku ketua UMKM Batu Orange Cake “Dengan adanya kemitraan serta bimbingan dari Pemerintahan Kota Batu saya sangat senang, setidaknya dengan kemajuan teknologi produk kami bisa lebih banyak dikenal orang ”. (Wawancara tanggal 6 Juni 2024, pukul 13.00 WIB di UMKM Batu Orange Cake).

Strategi pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan pola kemitraan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM memberikan pedoman yang luas dalam pengembangan produktivitas UMKM yang ada di Kota Batu.

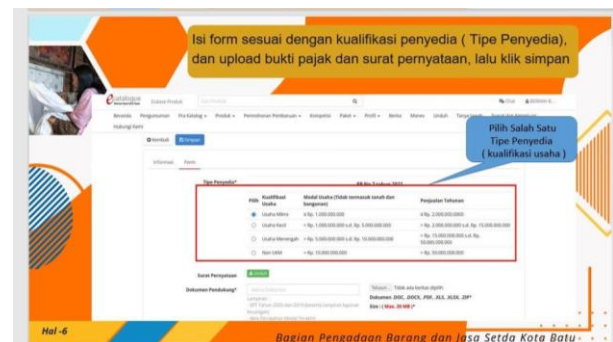
Transparansi UMKM

Pada dasarnya penerapan teknologi digital dalam kemitraan UMKM merupakan langkah awal dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Batu. Merujuk pada sebuah transparansi berbicara pada keterbukaan kegiatan kemitraan baik dari segi pemesanan, negosiasi, pengiriman dan pembayaran. Selain itu tidak menutup batasan bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya ke E-Katalog yang ada di Kota Batu.

Berikut ini saya sajikan penayangan produk di E-Katalog lokal sebagai berikut:



Gambar 3.3 Tata Cara Penayangan Produk UMKM di E-Katalog
 Sumber: Data Skunder



Gambar 3.4 Kategori Jenis UMKM yang ada di E-Katalog
 Sumber: Data Skunder

Dari penyajian gambar 3.3 dan 3.4 terlihat bahwa tidak ada batasan bagi pelaku UMKM yang ingin menampilkan produknya di E-Katalog asalkan memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu. Adapun syarat yang harus di penuhi yaitu identitas wajib UMKM sebagai berikut: Perijinan usaha, NPWP, KTP dan Rekening Bank.

Berdasarkan hasil wawancara terkait transparansi UMKM di E-Katalog diungkapkan oleh Ibu Siti Roidah selaku ketua UMKM Batu Orange Cake “E-Katalog sangat mebantunya kami dalam melakukan promosi, saya sangat mudah

untuk daftar asalkan kelengkapan administrasi memang harus di lengkapi terutama identitas wajib usaha kami ”. (Wawancara tanggal 6 Juni 2024, pukul 13.00 WIB di UMKM Batu Orange Cake).



Gambar 3.5 UMKM Batu Orange Cake
Sumber: Data Primer



Gambar 3.6 Wawancara Dengan Ketua UMKM Batu Orange Cake
Sumber: Data Primer

3.2 Faktor penghambat penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu

Ketergantungan Terhadap Pemerintah

Sinergi dan kerjasama antar pihak dibutuhkan untuk membangkitkan kembali perekonomian lokal terutama UMKM. Pemasaran produk secara digital dan meluas juga berperan penting dalam peningkatan penjualan dan produktivitas UMKM. Kedepannya diharapkan semakin banyak UMKM yang tertarik memasarkan produknya melalui online atau e-purchasing dan pemerintah tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan terus berinovasi dengan meingimplementasikan sistem yang lebih baik.

Sutojo (1994) dalam Baswir (1997:49) menyebutkan faktor yang menghambat dalam pengembangan sektor UMKM antara lain tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah cenderung sangat besar. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan M. Taufan Pabeta, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu menyatakan “E-katalog merupakan inovasi pemerintah daerah yang cukup baik, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kurang peran aktif pelaku UMKM dalam menjalin kerjasama dengan kami. Para pelaku UMKM mintanya kita jemput bola ke tempat produksi mereka, padahal mereka bebas bisa datang ke kantor kam, akan kami layani semaksimal mungkin ”. (Wawancara tanggal 4 Juni 2024, pukul 10.00 WIB di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu).

Melihat dari hasil wawancara diatas bahwa proses kemitraan yang ideal agar berjalan dengan baik perlu adanya sebuah kerjasama. Rasa saling membutuhkan bukan ketrgantungan harus menjadi pedoman dalam menjalin kemitraan yang berbasis tekhnologi digital.

Persyaratan Adminsitratif

Identitas UMKM merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap legalitas usaha. Dengan adanya legalitas akan memberikan sebuah kemudahan dalam beberapa aspek baik untuk akses permodalan maupun pemasaran produk. Tetapi yang terjadi saat ini baik secara menyeluruh maupun yang ada di Kota Batu bahwa pelaku UMKM sangat sulit dan enggan untuk mengurus legalitas usahanya.

Sutojo (1994) dalam Baswir (1997:49) menyebutkan faktor yang menghambat dalam pengembangan sektor UMKM antara lain Sebagai besar tidak mampu memenuhi persyaratan administratif. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan M. Taufan Pabeta, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu menyatakan "*Pesyaratan administratif saat ini menjadi masalah besar bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya di e-katalog. Padahal kalau kita lihat legalitas memang mutlak untuk dibutuhkan bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Batu*". (Wawancara tanggal 4 Juni 2024, pukul 10.00 WIB di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran aktif bagi *stake holder* sangat penting Hal tersebut agar program kemitraan yang dilaksanakan dapat berdampak luas terhadap UMKM yang ada di Kota Batu.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu dan UMKM Batu Orange Cake kami mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu yaitu: Pertama pemanfaatan tekonologi digital, yaitu implementasi e-katalog untuk pemasaran UMKM. Kedua transparansi UMKM yaitu keterbukaan seluruh UMKM Kota Batu untuk daftar pada e-katalog. formal yang
2. Faktor penghambat penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu yaitu: Pertama Ketergantungan terhadap pemerintah dan kedua persyaratan administratif.

Saran

Dari analisa permasalahan yang kami ketahui maka faktor

ketergantungan terhadap pemerintah dan persyaratan administratif dalam Penerapan sistem E-Katalog sebagai pola kemitraan untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pada Kemitraan Batu Orange Cake dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu. Dari hasil penelitian saya menawarkan sebuah kolaborasi antar *stake holder* dalam program kemitraan selain itu peran aktif pelaku UMKM terhadap program kemitraan oleh pemerintah Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Colgate, M., & Smith, B. (2005). Relationships and the internet: The mediating role of a relationship banker. *Journal of Financial Services Marketing*, 10(2), 140-151.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.fsm.4770181>.
- Dama, Y., Rotinsulu, T. O., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Implementasi E-Purchasing, Akses Pasar, Dan Persaingan Bisnis Terhadap Prinsip Akuntabel Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Journal Pembangunan ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(04), 39-53.
- Hadiyati, Ernani. 2010. *Kemitraan UMKM*. Malang: Publishing.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priani, Amalia. 2023. *Pengembangan Umkm Berbasis Teknologi Digital Dan Ekonomi Kreatif Di Desa Kutamakmur*.
<https://3642-Article-Text-8219-1-10-20230124.pdf>.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Rill UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Ramdani, B., Chevers, D., & A. Williams, D. (2013). SMEs' adoption of enterprise applications. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(4), 735-753.
<https://doi.org/10.1108/JSBE-D-12-2011-0035>.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Taiminen, H. M., & Karjaluo, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 22(4), 633-651.
<https://doi.org/10.1108/JSBE-D-05-2013-0073>.
- Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Online dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.
- Paparan presntasi E-Katalog Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Batu.